

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2016.
- Anto, D., et al., *Kecurangan dalam Perpajakan: Analisis dan Pencegahan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2020
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Idnonesia, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009.
- Eva Achjani zulfa, Dkk. *Asas-asas hukum pidana perpektif KUHP baru*. Jakarta : RajaGrafindo Persada 2023.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Haula Rosdiana, *Pengantar Perpajakan: Konsep Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mokhammad Najih, Soimin, *Hukum Pajak, Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),
- Pranasari, Kiki. *Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar*

(*Fraudulent Misrepresentation*) . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1991.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017.

Sabri Fadillah, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003.

Suandy Elly. "*Pajak dan hukum pajak*" Jakarta: salemba empat, 2017.

Sudarto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Suharto R.M. *Hukum Pidana Materiel: Unsur-unsur obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S. Hiariej, *Kaidah Hukum, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2024.

B. Jurnal

Akmal, Sahuri Iasmadi, and Dessy Rakhmawati, "*kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelacran di Indonesia* ", PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 4.1 (2023), 2721-8325

Antara, "*Tindak Pidana Pajak Adalah Extra-Ordinary Crime*", <https://investor.id/archive/tindak-pidana-pajak-adalah-extra-ordinary-crime>.

Barendregt, Marko, et al *Faktors associated with experts' opinions regarding criminal responsibility in the netherlands* Behav Sci Law 2008.

Behav Sci Law, *Faktors associated with experts' opinions regarding criminal responsibility in the Netherlands*, 2008.

- Cressey, D. R., *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Free Press, New York, 1953.
- Dhia Prawati, Levana. *Pengantar Perpajakan Definisi pajak, Fungsi Pajak dan Jenis pajak*” <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/10/pengantar-perpajakan-definisi-pajak-fungsi-pajak-jenis-pajak/>.
- Hallo, Jendela. *Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana* <https://jendelahukum.com/mengenai-konsep-pertanggungjawaban-pidana/>.
- Muhamad Sadi Is, “*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*”, Jurnal Yudisial, Vol 13 No. 3, 2020, hlm. 5.
- Delicia, Nadya Frisca, and Ariawan Gunadi, ‘Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Doktrin Business Judgement Rule’, 6.2 (2023), 4309–19
- Hadi Sugianto, *Peran Konsultan Pajak sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, 2017.
- Javan Sukma Ningrat, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2023.
- Megasari Br Nababan, Dennys, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya’, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4.27 (2023), 2721–8325
- Ningrat, Javan Sukma, Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif’, 2023
- Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, “*Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 No. 2, 2021, hlm. 130
- Nguyen, T., *Fraudulent Financial Reporting: A Study of Corporate Governance*, Springer, New York, 2008.
- Oktaviyoni, Aptri. “*Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*” DJP diakses 24 Sept 2024 [Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka | Direktorat Jenderal Pajak](#)

Ramdhan Hermawan, *“Pertanggungjawaban Perdata Maskapai Penerbangan Lion Air Atas Kerusakan Dan Kehilangan Bagasi Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dihubungkan Dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, 2019.

Wulan Dani Surya, *mengenal unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan* direktorat jenderal pajak <https://www.pajak.go.id/en/node/70423>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

Republik Indonesia Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang republic Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang republic Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak